

Pemerintahan Jepang

Gedung Diet



Undang-undang Dasar Jepang

UUD Jepang saat ini merupakan hasil amandemen dari Undang-undang Kekaisaran Jepang yang berlaku hingga tahun 1946. UUD yang sekarang diumumkan secara resmi setelah terjadi perang ketika Jepang masih ada di bawah pendudukan tentara Amerika. UUD yang berlaku sekarang diresmikan pada tahun 1947.

UUD Jepang yang sekarang ini terdiri dari: Pembukaan dan 103 pasal. Pasal tersebut mencakup tentang masalah: kekaisaran, penolakan perang, hak dan kewajiban warga negara, parlemen (diet), kabinet pemerintah, dan pelaksanaan keadilan. UUD modern Jepang berbeda dengan UUD yang ada pada zaman Meiji, yang pada saat itu kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat juga tidak di tangan pemerintah. UUD tersebut sangat menekankan perdamaian dunia dan penjaminan HAM.

HAM yang termasuk di dalam UUD yaitu, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan bersuara, kebebasan menuntut dan membela diri. Selain itu setiap warga negara berhak untuk menuntut HAM dan kelayakan hidup.

Dengan adanya sistem komputerisasi di pemerintah, kebutuhan akan sebuah sistem yang dapat melindungi rahasia jelas terlihat pada tahun 1988, kemudian diresmikanlah Hukum Perlindungan Rahasia Pribadi.

Parlemen (Diet)

Diet merupakan badan Legislatif Jepang satu-satunya, juga merupakan majelis terendah (House of Representative) dan majelis tertinggi (House of Councilors). Ada 512 anggota majelis terendah dan 252 anggota majelis tertinggi. Hasil laporan pada tahun 1991, anggota majelis perempuan berjumlah 2,3%. Bila dibandingkan dengan negara demokratis lainnya, Jepang menduduki peringkat 110 di dunia. Jelas terlihat bahwa laki-laki lebih mendominasi politik Jepang.

Pada tahun 1993, selama masa kabinet Hosokawa, seorang perempuan yang bernama Takako Doi, terpilih sebagai pembicara House of Representatives dan diangkat sebagai menteri pemerintahan. Sejak saat itu perempuan mulai berperan aktif dalam politik Jepang dan memiliki pengaruh yang kuat. Bahkan dimasa yang akan datang dipercaya anggota Diet perempuan akan

terus meningkat.

Pemilihan Umum

Anggota diet dipilih untuk menduduki satu posisi oleh warga negara. Pada saat pemilihan, kertas pemilihan suara disebarkan kepada setiap pemilih yang memenuhi syarat usia lebih dari 20 tahun baik di kota maupun di desa. Dan bagi yang sudah berumur 25 tahun sudah dapat dipilih. Anggota majelis terendah dipilih untuk masa kerja selama 4 tahun.

Pengalihan Kekuatan Politik

Pada tahun 1993, masa pemerintahan Hosokawa berakhir setelah 40 tahun menggunakan aturan partai tunggal . Partai demokratik liberal, mengantarkan zaman baru penggabungan pemerintah ke dalam dunia politik jepang. Hal ini dilakukan untuk membangun masyarakat demokratis. Hal ini lebih sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan menggunakan ideologi tunggal karena ideologi demokratis liberal membutuhkan berbagai ide dan nilai yang harus diterapkan.

Kabinet

Kabinet terdiri dari 13 menteri dan perdana menteri dan berada di bawah kekuasaan pemerintah. Menteri-mentri yang ada dalam kabinet di antaranya: Menteri luar negeri, yang mengurus kebijaksanaan luar negeri, Menteri pendidikan, mengatur pedoman pelaksanaan pendidikan, Menteri Keuangan, yang mengatur anggaran belanja negara, Menteri Perhubungan, mengawasi fasilitas perhubungan, Menteri Pos dan Telekomunikasi, menaungi penyimpanan surat dan membuat peraturan penyiaran televisi, Menteri Pembangunan, mengawasi tata kota, Pembangunan DAM, perlindungan sungai, pembangunan jalan, Menteri Dalam negeri, Menteri

Tenaga Kerja, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri, Menteri Kesejahteraan Masyarakat, Menteri Keadilan. Badan Pemerintah ini diatur langsung oleh Perdana Menteri.

Jepang memiliki reputasi di luar negeri sebagai "Masyarakat Birokratis" yang berjalan sesuai dengan aturan. Ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa faktor Diet terlihat pengaruhnya di daerah yang mengalami kekacauan. Selain itu menteri pemerintah sudah ditempatkan di tempat yang dapat menimbulkan efek pada kebijaksanaan pemerintah sewaktu-waktu. Bagaimana pun birokrasi dan pemerintah mengalihkan tanggung jawab merupakan efek negatif yang ada dalam sistem pemerintahan.

Hukum Pengadilan

DI Jepang pengadilan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keadilan, korupsi, kasus kriminal, dan perdata, boleh diselesaikan di pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung atau di Pengadilan Daerah. Jepang berbeda dengan Amerika, masyarakat Jepang lebih memilih memutuskan perkara daripada bernegosiasi dengan orang luar dan memasukkan mereka dalam pengadilan. Banyak yang lebih memilih menyelesaikan kasus perdata secara pribadi.

Pemerintah daerah

Yang dimaksud dengan pemerintah daerah yaitu pengelolaan secara otonom, urusan masyarakat setempat sesuai dengan kehendak penduduk setempat .

Ada 3 ciri pemerintan daerah :

1. Pimpinan eksekutif dipilih seccara langsung melalui pemungutan suara rakyat., sebagai wakil-wakil rakyat mereka mengawasi dan mengarahkan para pegawai negeri setempat dan mengurus hal-hal yang dipercayakan kepada pemerintah daerah oleh undang-undang atau pusat.
2. Kekuasaan penting dibebankan kepada DPRD yang dipilih oleh rakyat secara langsung,

DPRD hanya terdiri dari satu majelis aja, tidak sama dengan majelis nasional (Diet).

Pemerintah daerah seluruh Jepang dibagi secara administratif yaitu yang disebut TO,DO,

FU, KEN.